

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN KULI BANGUNAN
TERKAIT KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 35
TAHUN 2021 DAN *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

ANWAR MUSADAT

(2286040013)

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON**


1445H / 2024M

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN KULI BANGUNAN TERKAIT
KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NO. 35
TAHUN 2021 DAN *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**



Pembimbing I,


Dr. H. Didi Suwardi, M.H.
NIP. 196912262009121001

Pembimbing II,


Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D
NIP. 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Anwar Musadat
Nim : 2286040013
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati
Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 11 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Anwar Musadat

NIM : 2286040013

Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam
Negeri Syekh Nurjati
Cirebon
Di Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Anwar Musadat** yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Karyawan Kuli Bangunan Terkait Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”** telah dapat diujikan.

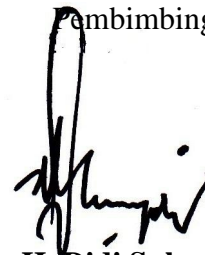
Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 11 Juni 2024

Pembimbing I,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP. 196912262009121001

Ahmad Rofii, M.A., LLM, Ph.D

Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam
Negeri Syekh Nurjati
Cirebon
Di Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Anwar Musadat** yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Karyawan Kuli Bangunan Terkait Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”** telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cirebon, 11 Juni 2024

Pembimbing II,



Ahmad Rofii, M.A., LLM, Ph.D.

NIP. 197607252001121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN KULI BANGUNAN
TERKAIT KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 35
TAHUN 2021 DAN MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)

Disusun oleh:

Anwar Musadat

2286040013

Telah diujikan pada tanggal 11 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Ketua/Anggota,



Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP. 196303051999031001

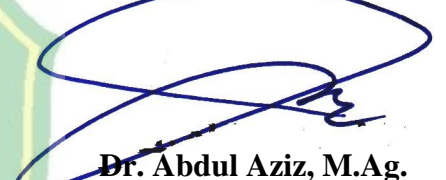
Pembimbing I/ Penguji,



Dr. H. Edy Sukardi, M.H.
NIP. 198511203219031009

Dewan Penguji

Sekretaris/Anggota,



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730526 200501 1 004

Pembimbing II/ Penguji,



Ahmad Rofii, M.A., LLM, Ph.D.
NIP. 197607252001121002

Penguji Utama,



Dr. Edy Setyawan, M.Ag
NIP.197704052005011003

Direktur



Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP. 19630305 199903 1 001

Abstrak

Anwar Musadat (2286040013) “Perlindungan Hukum Karyawan Kuli Bangunan Terkait Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Dan *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon), 2024.

Fenomena perjanjian lisan kuli bangunan menjadi suatu hal urgen yang harus diperhatikan, karena menyangkut beberapa hak-hak pekerja yang seharusnya diberikan, mengingat risiko kerja kuli bangunan yang tinggi. Maka dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, ini merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hukum preventif dari Pemerintah, namun timbul permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana masih banyak yang belum terealisasi sebagaimana semestinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis sumber data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan *Maqasid Syariah*.

Hasil penelitian ini adalah : *Pertama*, perjanjian kontrak kerja secara lisan sah dalam hukum positif maupun *maqasid syariah*, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang dijelaskan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021. Dan keabsahan perjanjian kerja lisan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *maqasid syariah*. *Kedua*, perjanjian kerja lisan sudah biasa dilakukan pekerja bangunan di Kecamatan Talun dan mereka melakukannya sudah turun-temurun, yang paling penting dalam akad lisan itu adalah kesepakatan antara bos dan pekerja. kontrak kerja lisan beresiko terjadi wanprestasi, namun hingga saat ini belum ada solusi yang lebih baik kecuali mereka harus melakukan perjanjian lisan. *Ketiga*, Pekerja kuli bangunan di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak pekerja, mereka tidak mendapatkan perlindungan terhadap waktu kerja, tidak mendapatkan jaminan upah yang layak, dan mendapatkan jaminan sosial. Begitu juga sama halnya bila ditinjau dari sudut pandang konsep *Maqashid Syariah* perjanjian lisan ternyata belum memberikan dampak kemaslahatan bagi pekerja, yang mana kemaslahatan merupakan tujuan *maqasid syariah*, akan tetapi masih banyak pekerja bangunan yang tidak mendapatkan perlindungan seperti halnya: kesulitan mendapatkan akses fasilitas ibadah, jaminan upah yang sesuai, jaminan perlindungan kecelakaan kerja, dan dianggap pekerja rendah, dimana itu adalah jauh daripada tujuan *maqasid syariah* yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, UU Cipta Kerja, Maqasid Syariah*

Abstract

Anwar Musadat (2286040013) "Legal Protection of Construction Worker Employees Related to Work Based on Oral Agreements from the Perspective of Government Regulation No. 35 of 2021 and Maqasid Syariah (Case Study of Talun District, Cirebon Regency), 2024.

The phenomenon of construction workers' verbal agreements is an urgent matter that must be considered, because it involves several workers' rights that should be given, considering the high risks of construction workers' work. So with the birth of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the Government issued derivative regulations in the form of Government Regulations and Presidential Regulations, one of which is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations, this is a form of realization of preventive legal protection from the Government, but problems arise in its implementation, where there are still many things that have not been realized as they should be.

This research is juridical-empirical legal research. The approach used is a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary data sources. Data collection methods were carried out using observation, interviews, documentation and analysis of data sources.

The aim of this research is to determine the legal protection for construction workers who are bound to work based on verbal agreements in Talun District, Cirebon Regency from the perspective of Government Regulation No. 35 of 2021 and Maqasid Syariah.

The results of this research are: First, verbal work contract agreements are valid in positive law and maqasid sharia, entitled to legal protection. As explained in article 2 paragraph (2) of Government Regulation No.35 of 2021. And the validity of an oral work agreement is valid if it meets the pillars and requirements of maqasid sharia. Second, verbal work agreements are common among construction workers in Talun District and they have been doing them for generations. The most important thing in a verbal contract is the agreement between the boss and the worker. Oral work contracts are at risk of default, but until now there has been no better solution unless they have to make an oral agreement. Third, construction workers in Talun District, Cirebon Regency have not received protection for their workers' rights, this is far from the realization of Government Regulation No. 35 of 2021. They do not receive protection over working time, do not receive adequate wage guarantees, and receive social security. . Likewise, if viewed from the perspective of the concept of Maqasid Syariah, verbal agreements apparently do not have a beneficial impact on workers, where benefit is the goal of Maqasid Syariah, but there are still many construction workers who do not receive protection, such as: difficulty in getting access to worship facilities, guarantees. appropriate wages, guaranteed work accident protection, and being considered lowly workers, which is far from the goal of maqasid sharia, namely for human benefit.

Keywords: Legal Protection, Job Creation Law, Maqasid Syariah

خلاصة

أنور مسادات (٢٠١٣، ٢٢٨٦) "الحماية القانونية لموظفي عمال البناء فيما يتعلق بالعمل بناءً على الاتفاقيات الشفهية من وجهة نظر اللائحة الحكومية القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢١ ومقاصد الشريعة (دراسة حالة منطقة تالون، مقاطعة سيريبون)، ٢٠٢٤.

إن ظاهرة الاتفاقيات الشفهية بين عمال البناء هي أمر ملح يجب النظر فيه، لأنها تنطوي على العديد من حقوق العمال التي ينبغي منحها، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مخاطر عمل عمال البناء. لذلك مع ولادة القانون رقم. قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص العمل، أصدرت الحكومة لوائح مشتقة في شكل لوائح حكومية ولوائح رئاسية، إحداهما اللائحة الحكومية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن اتفاقيات العمل ذات الوقت المحدد، والاستعانة بمصادر خارجية، ووقت العمل، ووقت الراحة، وإنهاء عقد العمل علاقات العمل، هذا شكل من أشكال تحقيق الحماية القانونية الوقائية من الحكومة، ولكن تظهر مشاكل في تنفيذها، حيث لا تزال هناك أشياء كثيرة لم تتحقق كما ينبغي.

وهذا البحث هو بحث قانوني فقهي تجريبي. النهج المستخدم هو النهج النوعي. تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتم استخدام طرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق وتحليل مصادر البيانات.

الهدف من هذا البحث هو تحديد الحماية القانونية لعمال البناء الملزمين بالعمل بناءً على اتفاقيات شفهية في منطقة تالون، مقاطعة سيريبون من منظور اللائحة الحكومية رقم. قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢١ ومقاصد الشريعة.

نتائج هذا البحث هي: أولاً، عقد العمل الشفهي صحيح في القانون الوضعي ومقاصد الشريعة، وله الحماية القانونية. كما هو موضح في المادة ٢ الفقرة (٢) من النظام الحكومي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢١. ويعتبر اتفاق العمل الشفهي صحيحاً إذا استوفى أركان ومتطلبات المقاصد الشرعية وكان هناك اتفاق. ثانياً، يتم تنفيذ اتفاقيات العمل الشفهية بشكل شائع من قبل عمال البناء في منطقة تالون، وقد ظلوا يقومون بذلك منذ أجيال. الشيء الأكثر أهمية في العقد الشفهي هو الاتفاق بين رئيس العمل / المقاول والعمال، على الرغم من أن عقود العمل الشفهية تحمل خطر التخلف عن السداد، ولكن حتى الآن لم يكن هناك حل أفضل باستثناء ضرورة التوصل إلى اتفاق شفهي. ثالثاً، لم يُلغَ عمال البناء في منطقة تالون، مقاطعة سيريبون، الحماية لحقوق عمالهم، وهذا بعيد كل البعد عن تحقيق اللائحة الحكومية رقم ٣٥ لعام ٢٠٢١. فهم لا يتلقون الحماية خلال وقت العمل، ولا يتلقون ضمانات كافية للأجور، والحصول على الضمان الاجتماعي. وبالمثل، إذا نظرنا من منظور مفهوم المقاصد الشرعية، يبدو أن الاتفاقيات الشفهية لم يكن لها تأثير مفيد على عمال البناء في منطقة تالون، حيث المنفعة هي هدف المقاصد الشرعية، ولكن لا يزال هناك العديد من عمال البناء الذين لا يحصلون على الحماية، مثل: صعوبة الوصول إلى دور العبادة، وضمان الأجور المناسبة، وضمان الحماية من حوادث العمل، واعتبارهم عمالاً وضيعين، وهو أمر بعيد عن مقاصد الشريعة وهي مصلحة الإنسان.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، قانون خلق فرص العمل، المقاصد الشرعية

KATA PENGANTAR

Alkhamduillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. berkat Tuhan tesis ini dapat penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidaklah mungkin tesis ini berwujud jika tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, partisipasi dan juga do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mimi dan Bapa yang selalu memeberi dukungan, mendo'a-kan dan menseponsori perkuliahan saya mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat, banyak rejeki.
2. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Ahmad Rofi'i, M.A., LLM., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Edy Styawan. M.Ag selaku dewan Penguji Utama.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana dan para staf Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menyelesaikan studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan pencari ilmu untuk mendapatkan gelar Magister Hukum HKI A dan B yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dan seluruh segenap angkatan tahun 2022.
9. Kepada Keluarga, teman dan saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
10. Kepada jodohku yang masih dirahasiakan Tuhan semoga kita cepat dipertemukan dalam do'a.

11. Kepada para barisan mantan yang sudah bahagia dengan pilihannya.
12. Kepada diriku sendiri yang sudah bersabar, bersemangat dan bersyukur sampe detik ini.
13. Kepada temean-teman buruh bangunan satu perjuangan, yang sudah mengajarkanku makna semangat hidup dibawah terik matahari dan arti keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup.

Hanya pada Allah SWT saja kembalinya segala syukur . Penulis hanya mampu mengucapkan *Alhamdulillah Jazakumullahu Khairan Katsiran*, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. Aamiin Penulis sangat menyadari tak ada gading yang tak retak dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis harapkan.



Cirebon, 11 Juni 2024

Anwar Musadat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ''	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ'	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	“	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya”mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā” mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----	---------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
خلاصة	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Pembatasan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN KULI BANGUNAN TERKAIT PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN	29
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
1. Teori Perlindungan Hukum.....	29
2. Tinjauan Umum Pekerja/Buruh	31
3. Perlindungan Hukum Pekerja	33
4. Hak-Hak Pekerja	36
5. Asas-Asas Perlindungan Hukum Pekerja	39
B. Perjanjian Kerja Perspektif Hukum Positif (Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021)	
1. Definisi Perjanjian.....	40
2. Subjek Perjanjian Kerja.....	41

3. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	42
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja	45
C. Perjanjian Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	48
2. Rukun dan <i>Syarat Ijarah 'ala Al - 'Amal</i>	54
3. <i>Asas-Asas Akad Ijarah</i>	60
D. Perjanjian Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	
1. Derfinisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	65
2. Tujuan dan Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	67
3. Keabsahan <i>Akad Dalam Maqasid Syariah</i>	72
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	76
A. Profil Kecamatan Talun	76
B. Tinjauan Umum Pekerja Kuli Bangunan Wilayah Talun	80
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN KULI	
BANGUNAN DI WILAYAH TALUN TERKAIT PERJANJIAN KERJA	
LISAN DITILAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 35	
TAHUN 2021 DAN MAQASID SYARIAH	83
A. Kontrak Kerja Lisan Kuli Bangunan Di Kecamatan Talun	83
B. Perlindungan Hukum Kuli Bangunan Di Kecamatan Talun Ditinjau Dari Hukum Poitif (Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021)	86
C. Perjanjian Kontrak Lisan Kuli Bangunan Di Kecamatan Talun Ditinjau Dari <i>Maasid Syariah</i>	100
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran - Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117